

Nomor : 21/PM.00.02/K.JI-37/05/2025 Kota Probolinggo, 14 Mei 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**

Kota Probolinggo

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, serta dengan akan dilaksanakannya Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Probolinggo **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo agar:

1. Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kota Probolinggo harus memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
2. Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk:
 - a. memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data; dan
 - b. menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.
3. Penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan oleh:
 - a. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - c. KPU paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

4. Penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan Data Pemilih;
 - b. penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam negeri;
 - c. penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan luar negeri; dan
 - d. penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat nasional.
6. Menyediakan Data Pemilih sebagai bahan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, data diperoleh dari:
 - a. DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;
 - b. data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. data yang bersumber dari instansi atau lembaga terkait; dan
 - d. laporan dari masyarakat.
7. KPU Kota Probolinggo melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengolahan data;
 - b. koordinasi;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. rekapitulasi.
8. Dalam melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
9. Koordinasi dapat dilakukan kepada;
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. Pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.
10. Koordinasi dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
11. Menghapus Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat, meliputi Pemilih dengan kriteria:

- a. meninggal dunia;
 - b. pemilih ganda;
 - c. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - d. pemilih pindah domisili;
 - e. pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - f. pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. warga negara asing; dan
 - h. pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Pemilih baru sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - c. mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - d. Pemilih pindah masuk.
13. KPU Kota Probolinggo melaksanakan Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:
- a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau
 - b. pertemuan melalui media dalam jaringan.
15. Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik.
16. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
17. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
18. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui:
- a. laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terimakasih.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo



Johan Dwi Angga, S.Pd

Tembusan.

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai laporan);
- 2. Arsip.

.